

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Albi Anggito & Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.

Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 16–18.

E. Sugeng Istanto. (2007). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Ganda.

Emily R, Lai, *Collaboration: A Literature Review*, (Pearson 2011), hlm 2.

Hasibuan, M. S. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Ndraha, T. (2003). *Kybernology (ilmu pemerintahan baru)*.

Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group.

Safwatulloh, M. I., Syafei, M., & Saptomo, P. *Koordinasi Antara Kejaksaan Dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Di Kota Pontianak*. *Nestor: Tanjungpura Journal of Law*, 3(1).

Salim HS. & Erlies S. Nurbani. (2014). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). *Collaboration processes: Inside the black box*. *Public administration review*, 66, 20-32.

Trisusilowaty, D., Lumbanraja, A. D., & Suteki, S. (2019). *Fungsi Pengawasan*

Oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Berbasis Pengaduan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Law Reform*, 15(1), 25-41.

Ulber Silalahi. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Zainal Arifin, S.T., M.Kom. *Pengantar Manajemen Proyek*, Edisi Kesatu.

Jurnal Ilmiah

Akbar, R. R. (2024). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Tanpa Pertanggungjawaban Pidana Melalui Lembaga Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1047-1062.)

Avi Ramadani & Otong Rosadi. Koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 6, No. 2, hlm. 104-111.

Bayu Bimantoro, Budi Hermawan Bangun & Hamdani. Koordinasi Penanganan Atas Dugaan Penyimpangan Pengerjaan Proyek Pemerintah Yang Berasal Dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah oleh Kepolisian dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Studi di Kalimantan Barat). *Tanjungpura Journal of Law*, hlm. 97.

Daeng, Y., Sitorus, S. H., Ruben, A., Tarigan, D. F., & Prakasa, S. (2024). Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 12981-12989.

Dormina Takaendengan. Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6, No. 3, hlm. 293.

Hasaziduhu Moho. Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Vol. 13, No. 1, hlm. 3-4.

- Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 1006-1017.
- Lesta Indra Waspada, Syamsuddin Muchtar & Amir Ilyas. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, hlm. 82-91.
- Mahmud Mulyadi. Pendekatan Integratif dalam Penanggulangan Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13, No. 1, hlm. 4.
- Moh Tamsil Thamrin. Lembaga Kepolisian dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Indonesia. *Maleo Law Journal*, Vol. 2, No. 2, hlm. 139.
- Mohammad Mulyadi. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 15, No. 1.
- Nurul Qomar. (2011). Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 13, No. 2, hlm. 152.
- Siahaan, H. P., Marlina, M., & Zul, M. (2019). Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2), 137-147.
- Tampanguma, K. S., Kalangi, J. A., & Rogahang, J. J. (2020). Kolaborasi Bisnis terhadap Pendapatan Pengelolaan Captikus di Desa Lalumpe. *Productivity*, 1(4), 322-327
- Vitayala, Aida. (2010). Pemberdayaan Perempuan. *Journal of IPB*. Bogor: IPB Press.
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 73-85.
- Zulkarnain W. Harahap, Gomgom T.P Siregar & Syawal Amry Siregar. Analisis Yuridis tentang Peranan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap

Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara).
Jurnal Retentum, Vol. 4, No. 1, hlm. 54-72.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 22. Diakses, melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/73586/perpres-no-16-tahun-2018>

Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 16.

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Sumber dari Internet

Admin. Kompas.com, Tersangka Korupsi E-KTP di Seram Bagian Barat Diserahkan ke Kejaksaan, Kompas.com, 30 Januari 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/01/30/232737178/tersangka-korupsi-e-ktp-di-seram-bagian-barat-diserahkan-ke-kejaksaan>

Admin. maluku.bpk.go.id, Empat Tersangka Korupsi e-KTP SBB Ditahan, BPK RI Perwakilan Maluku. <https://maluku.bpk.go.id/empat-tersangka-korupsi-e-ktp-sbb-ditahan>

Admin. MoU antara APIP dan APH, Jaksa Agung: Nota Kesepahaman menjadi Perwujudan dari Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.

[Online]. <https://kejari-acehtimur.kejaksaan.go.id>. (Diakses 25 Januari 2023).

BPK RI Perwakilan Maluku, “Empat Tersangka Korupsi e- KTP SBB Ditahan” (Maluku, 17 Februari 2023), menyebut kerugian negara Rp602.635.000 dan penetapan empat tersangka dalam kasus pengadaan e- KTP di Disdukcapil SBB. Diakses pada 27 juli, melalui : <https://maluku.bpk.go.id/empat-tersangka-korupsi-e-ktp-sbb-ditahan/>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “KPK Tegaskan Pentingnya Sinergi APH dan APIP dalam Penanganan Pengaduan Korupsi,” diakses 29 Juli 2025, <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/KPK-tegaskan-pentingnya-sinergi-aph-dan-apip-dalam-penanganan-pengaduan-korupsi>.

Peralatan perekaman e-KTP. [Online].<https://humas.polri.go.id/2023/01/31/polres-sbb-serahkan-satu-tersangka-yang-ketiga-perkara-korupsi-pengadaan-peralatan-perekaman-e-ktp/>. (Diakses 31 Januari 2023).

Dokumen Surat

Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat, *Surat Nomor 714/317 perihal Tanggapan Surat Pengaduan Laporan Pengaduan*, tertanggal 17 Juli 2023.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku, Resor Seram Bagian Barat, *Surat Nomor B/1000/VII/2023/Reskrim perihal Permohonan Tanggapan atas Laporan Pengaduan*, tertanggal 10 Juli 2023.

Nota Kesepahaman (MoU)

Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. No. 100.4.7/437/SJ. No. 1 Tahun 2023. No. NK/1/I/2023. Tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.